

Boru Batak, Boru Ni Raja : Seberapa Pentingkah Pendidikan bagi Perempuan Batak?

Grace Prima Apriani Sihombing¹, Aprilia Cahyani Prabudiantoro Putri²,
Silvia Annisa³

¹Universitas Terbuka, grace.prima@ecampus.ut.ac.id

²Universitas Terbuka, aprilia.cahyani@ecampus.ut.ac.id

³Universitas Sumatera Utara, silviaannisa@usu.ac.id

ABSTRAK

Dalam budaya Batak, perempuan dikenal sebagai Boru Ni Raja. Boru Ni Raja merupakan sebuah konsep yang mencerminkan penghormatan terhadap martabat, peran, dan tanggung jawab perempuan dalam kehidupan keluarga maupun adat. Namun, penghormatan yang bersifat simbolik tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesempatan pendidikan yang setara. Di berbagai wilayah pedesaan Sumatera Utara, partisipasi pendidikan perempuan masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga kuatnya ekspektasi budaya yang mendorong perempuan memasuki peran domestik pada usia muda. Artikel ini mengkaji pentingnya pendidikan bagi perempuan Batak dalam perspektif budaya, relasi gender, dan perubahan sosial kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan data pendukung. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan berperan penting dalam memperluas peluang hidup perempuan, memperkuat kapasitas mereka sebagai agen perubahan, serta memungkinkan mereka mempertahankan identitas budaya secara kritis dan reflektif. Kajian ini memperkaya diskursus relasi antara budaya lokal, struktur patriarkal, dan hak pendidikan perempuan di Indonesia.

Kata kunci : Boru Ni Raja, Pendidikan Perempuan, Budaya Batak, Gender

1. PENDAHULUAN

Perempuan Batak hidup dalam ruang budaya yang menyimpan penghormatan sekaligus tantangan. Dalam tradisi Batak, perempuan dikenal sebagai *Boru Ni Raja* atau ‘anak perempuan raja’, sebuah sebutan yang tidak hanya menunjukkan penghargaan terhadap martabat perempuan, tetapi juga menggambarkan peran penting mereka dalam menjaga keharmonisan keluarga dan hubungan antarmarga melalui sistem perkawinan adat (Fredriko, 2024 : 144). Sebutan ini mencerminkan harapan dan tanggung jawab besar yang dilekatkan kepada perempuan sejak dini. Namun, di balik penghormatan tersebut, masih terdapat berbagai keterbatasan yang dihadapi perempuan dalam memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kepemilikan sumber daya, maupun ruang pengambilan keputusan di ranah publik (Irmayani dkk, 2026 :63). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghormatan simbolik yang diberikan oleh budaya dan realitas sosial yang dialami

perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Kontradiksi inilah yang menjadi titik tolak penting dalam memahami posisi perempuan Batak di tengah dinamik (Pardede, 2023:49).

Secara umum pada masyarakat Batak tradisional, peran perempuan cenderung dibatasi dalam ruang domestik, meskipun pada saat yang sama mereka diharapkan mampu menjaga martabat keluarga dan meneruskan nilai-nilai adat (Simatupang, 2021). Sementara laki-laki diberi ruang lebih luas dalam pendidikan dan pengambilan keputusan (Hutahaean dkk, 2020 :315), perempuan sering kali dihadapkan pada pilihan antara meneruskan sekolah atau menikah muda, apalagi jika keluarga menghadapi keterbatasan ekonomi. Dalam struktur budaya patriarkal seperti ini, pendidikan bagi perempuan tidak selalu dianggap sebagai prioritas, melainkan sebagai pelengkap jika kondisi memungkinkan (Pasaribu, 2026 : 1633). Padahal, pendidikan memiliki peranan krusial dalam meningkatkan kualitas hidup dan memberdayakan perempuan secara sosial, ekonomi, dan politik. Berbagai studi menunjukkan bahwa perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap pekerjaan, kesehatan, serta partisipasi publik yang lebih besar (UNESCO, 2022). Pendidikan juga menjadi jalan bagi perempuan untuk memperkuat posisinya dalam keluarga dan komunitas, serta menjadi agen perubahan dalam pelestarian budaya sekaligus menghadirkan inovasi dalam ranah tradisional.

Tabel 1. *Data pendidikan perempuan Capaian di Wilayah dengan Populasi Batak 2022*

Kabupaten	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Tapanuli Utara	14,18 tahun	9,69 tahun
Toba (Toba Samosir)	13,62 tahun	10,40 tahun
Samosir	14,47 tahun	8,74 tahun
Humbang Hasundutan	14,42 tahun	9,49 tahun
Dairi	13,22 tahun	9,39 tahun
Karo	13,34 tahun	9,85 tahun
Pakpak Bharat	15,03 tahun	8,67 tahun
Tapanuli Selatan	14,08 tahun	8,99 tahun
Mandailing Natal	13,89 tahun	8,39 tahun

Sumber: BPS Sumatera Utara, 2022.

Data dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara (dalam Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Sumatera Utara, 2022 : 28) di atas menunjukkan bahwa peluang perempuan untuk berpendidikan jauh lebih tinggi dibandingkan dari laki-laki meskipun realisasi lebih rendah. Meskipun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan di Sumatera Utara secara konsisten lebih tinggi dibandingkan laki-laki sejak tahun 2010, angka

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) perempuan justru masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Temuan BPS menyebutkan bahwa terdapat kendala budaya dimana beberapa komunitas Masyarakat masih terdapat pandangan atau budaya yang menganggap perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena kekhawatiran sulit mendapatkan jodoh (perawan tua) serta terdapat keterbatasan ekonomi yang memprioritaskan laki-laki.

Realitas lainnya yang dihadapi perempuan Batak menunjukkan bahwa penghormatan budaya tidak selalu berjalan seiring dengan kesempatan yang mereka peroleh dalam kehidupan sosial. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (dalam Statistik Pendidikan Sumatera Utara, 2022 : 24) juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan pada jenjang SMA di beberapa kabupaten yang mayoritas penduduknya berasal dari etnis Batak, seperti Toba, Humbang Hasundutan, dan Tapanuli Utara, masih berada sekitar 4–6 persen di bawah partisipasi laki-laki. Situasi ini mengindikasikan bahwa sebagian perempuan masih menghadapi hambatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Di saat yang sama, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 mencatat bahwa 12,4 persen perempuan usia 20–24 tahun di Sumatera Utara menikah sebelum usia 18 tahun, dengan angka yang lebih banyak ditemukan di wilayah pedesaan yang masih kuat dipengaruhi oleh norma-norma patriarkal. Adapun temuan-temuan diatas memperlihatkan bahwa penghormatan terhadap perempuan yang hidup dalam simbol dan narasi adat belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan, menentukan pilihan hidup, dan mengembangkan potensi diri secara optimal (Pardede, 2023:61).

Artikel ini berangkat dari sebuah pertanyaan mendasar : mengapa penghormatan budaya yang begitu kuat terhadap perempuan Batak sebagai *Boru Ni Raja* belum secara otomatis menghadirkan kesempatan pendidikan yang setara bagi mereka? Pertanyaan ini menjadi penting karena terdapat jarak antara nilai ideal yang hidup dalam budaya dan realitas yang dialami perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai penelitian terdahulu telah membahas posisi perempuan Batak dalam sistem adat dan relasi kekerabatan (Butar-butar, 2020; Fredriko, 2026; Pasaribu, 2026) namun masih sedikit yang secara khusus mengkaji bagaimana konsep *Boru Ni Raja* dapat dimaknai kembali sebagai sumber kekuatan untuk mendorong pemberdayaan pendidikan perempuan di tengah perubahan sosial yang semakin dinamis. Oleh sebab itu, artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan perspektif sosio-kultural, temuan empiris, dan teori gender guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Secara khusus, kajian ini bertujuan untuk: (1) memahami makna *Boru Ni Raja* dalam struktur sosial masyarakat Batak serta berbagai ambiguitas yang menyertainya; (2) mengidentifikasi faktor-faktor budaya yang masih membatasi akses pendidikan perempuan Batak; dan (3) menjelaskan bagaimana pendidikan dapat menjadi sarana transformasi yang memperkuat posisi sosial perempuan tanpa harus melepaskan akar identitas budaya yang mereka miliki.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Creswell dkk, 1998) dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk

menggali makna sosial dan budaya dari konsep *Boru ni Raja*, serta menelaah secara mendalam peran pendidikan dalam kehidupan perempuan Batak melalui lensa budaya dan gender. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber sekunder, seperti buku-buku etnografi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi yang relevan (Assyakurrohim, 2022 :3). Artikel juga mengacu pada sumber-sumber primer yang mendeskripsikan sistem kekerabatan Batak, adat-istiadat, serta pengalaman perempuan Batak dalam dunia pendidikan dan kehidupan sosial.

Analisis dilakukan secara interpretatif-tematik dengan mengidentifikasi tiga tema utama: (1) simbolisasi sosial perempuan Batak dalam adat; (2) pandangan budaya terhadap pendidikan perempuan beserta hambatan strukturalnya; dan (3) transformasi peran perempuan melalui pendidikan. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi hubungan antara struktur budaya, nilai-nilai lokal, dan dinamika perubahan sosial dalam kehidupan perempuan Batak. Selain itu, kerangka konseptual yang digunakan dalam analisis ini merujuk pada teori gender dan pendidikan, serta teori post-strukturalis dalam memahami identitas kultural perempuan. Kerangka ini penting untuk membaca ulang narasi budaya yang telah mapan dalam masyarakat Batak, terutama dalam hal posisi perempuan, dengan lensa yang lebih kritis dan transformatif.

3. ANALISIS DATA

3.1. Makna Boru Ni Raja dalam Budaya Batak: Antara Penghormatan dan Ambiguitas Peran

Dalam kehidupan masyarakat Batak Toba, perempuan sering disebut sebagai *Boru Ni Raja*, sebuah sebutan yang sarat dengan penghormatan dan kebanggaan budaya. Secara harfiah, istilah ini berarti “anak perempuan raja”, yang mencerminkan pandangan bahwa perempuan memiliki martabat tinggi dan memegang peran penting dalam menjaga kehormatan keluarga serta keberlangsungan hubungan antarmarga. Dalam sistem *Dalihan Na Tolu* yang menjadi fondasi kehidupan sosial masyarakat Batak; perempuan tidak hanya dipandang sebagai anggota keluarga, tetapi juga sebagai penghubung yang memperlancar relasi antara berbagai kelompok kekerabatan. Kehadiran mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai upacara adat, mulai dari pernikahan hingga ritual kematian, sehingga posisi perempuan sering kali dianggap sebagai perekat harmoni sosial dalam masyarakat Batak (Sihombing, 2018 : 350).

Namun, di balik penghormatan tersebut terdapat realitas yang lebih kompleks. Perempuan memang dihargai sebagai penjaga hubungan sosial, tetapi penghargaan itu tidak selalu diikuti oleh kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam perspektif teori strukturasi Giddens (1984), kondisi ini menunjukkan bahwa penghormatan yang diberikan kepada perempuan lebih banyak berkaitan dengan fungsi sosial yang mereka jalankan daripada pengakuan terhadap mereka sebagai individu yang memiliki otonomi dan hak yang sama. Dalam praktik adat, misalnya, hak atas tanah warisan, kepemimpinan formal dalam forum adat, serta penerusan marga masih didominasi oleh laki-laki (Manurung, 2026 : 56). Akibatnya, perempuan Batak sering berada dalam posisi yang harus menegosiasikan

peran budaya, identitas gender, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya secara bersamaan. Situasi ini sejalan dengan gagasan Collins (1990) tentang interseksionalitas, di mana berbagai bentuk ketidaksetaraan saling bertemu dan memperkuat satu sama lain dalam pengalaman hidup perempuan.

Gambaran tersebut terlihat dalam penelitian etnografi yang dilakukan di Kabupaten Toba (Firmando, 2020 : 50). Banyak perempuan yang terlibat dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mereka kerap menghadapi tuntutan untuk mengutamakan kewajiban adat dibandingkan pendidikan atau pekerjaan yang sedang mereka jalani (Naibaho, 2024 :282). Tidak jarang mereka harus menunda aktivitas akademik, mengurangi kesempatan pengembangan diri, atau mengorbankan waktu profesional demi memenuhi ekspektasi keluarga dan komunitas adat. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai *Boru Ni Raja* mengandung dua sisi yang berjalan bersamaan: di satu sisi memberikan penghormatan dan identitas yang membanggakan, tetapi di sisi lain dapat menghadirkan beban sosial yang membatasi ruang gerak perempuan untuk mengembangkan potensinya secara lebih luas.

Meski demikian, perubahan sosial yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir mulai membuka ruang bagi penafsiran yang lebih progresif terhadap makna *Boru Ni Raja*. Generasi perempuan Batak masa kini semakin banyak yang memandang identitas tersebut bukan hanya sebagai simbol peran adat, melainkan juga sebagai sumber kekuatan untuk berkiprah di bidang pendidikan, profesi, dan kehidupan publik (Arabiyah dkk, 2024 :2356). Di berbagai kota besar seperti Medan dan Jakarta, perempuan Batak berpendidikan tinggi semakin terlihat mengambil peran sebagai akademisi, birokrat, pemimpin organisasi, maupun politisi (Naibaho, 2024 :285). Bagi mereka, menjadi *Boru Ni Raja* tidak lagi hanya berarti menjaga tradisi, tetapi juga berani berkontribusi dalam menciptakan perubahan sosial. Reinterpretasi ini menunjukkan bahwa nilai budaya tidak selalu bersifat statis; ia dapat terus berkembang dan menjadi landasan bagi pemberdayaan perempuan tanpa harus kehilangan akar identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi (Sinaga, 2025).

3.2. Pandangan Budaya terhadap Pendidikan Perempuan: Hambatan Struktural dan Pergeseran Nilai

Dalam banyak keluarga Batak pada masa lalu, pendidikan sering kali dipandang sebagai investasi yang lebih penting bagi anak laki-laki. Cara pandang ini berakar pada sistem sosial dan kekerabatan patrilineal yang menempatkan laki-laki sebagai penerus marga dan calon pemimpin keluarga. Karena dianggap akan tetap membawa nama keluarga dan berkontribusi langsung bagi komunitas, pendidikan anak laki-laki kerap memperoleh prioritas yang lebih besar. Sebaliknya, anak perempuan sering dipersepsikan akan menjadi bagian dari keluarga suaminya setelah menikah, sehingga investasi pendidikan yang diberikan kepada mereka dianggap tidak memberikan manfaat langsung bagi keluarga asal (Girsang, 2023 :119). Pandangan tersebut juga diperkuat oleh nilai-nilai budaya yang mengidealkan perempuan sebagai parhobas, yaitu sosok yang terampil mengelola rumah tangga dan menjalankan berbagai tanggung jawab domestik (Butar-butar, 2020 :6).

Konsekuensinya, tidak sedikit perempuan Batak yang menghadapi berbagai hambatan dalam melanjutkan pendidikan. Hambatan tersebut bukan hanya lahir dari keyakinan budaya, tetapi juga diperkuat oleh kondisi ekonomi dan struktur sosial yang ada. Data Badan Pusat

Statistik Sumatera Utara (dalam Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Sumatera Utara, 2022 : 28) menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah perempuan di Kabupaten Samosir masih berada di bawah laki-laki. Kesenjangan ini mencerminkan bahwa kesempatan untuk mengenyam pendidikan belum sepenuhnya dinikmati secara setara. Situasi serupa terlihat di Kabupaten Tapanuli Utara, di mana sebagian perempuan tidak dapat menyelesaikan pendidikan menengah karena harus menikah pada usia muda (Heriansyah, 2021 :95), membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, atau menghadapi anggapan bahwa pendidikan tinggi bukanlah kebutuhan utama bagi perempuan (Simanjuntak, 2025 : 64). Angka-angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan perempuan Batak tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja, melainkan merupakan hasil pertemuan antara keterbatasan ekonomi, norma budaya, dan ketimpangan struktural yang saling memengaruhi.

Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan yang berupaya menempuh pendidikan tinggi sering kali harus menavigasi berbagai harapan sosial yang melekat pada identitas mereka sebagai perempuan Batak. Perspektif subjektivitas poststrukturalis yang dikemukakan Weedon (1997) membantu menjelaskan bagaimana perempuan membangun pilihan hidupnya di tengah berbagai narasi budaya yang kadang saling bertentangan. Keinginan untuk melanjutkan studi, berkarier, atau aktif di ruang publik tidak jarang berhadapan dengan ekspektasi untuk tetap memprioritaskan peran domestik dan kewajiban adat. Dalam beberapa konteks, perempuan yang terlalu menonjol di ruang publik bahkan dapat dianggap kurang menghargai adat atau tidak memenuhi harapan sosial yang berlaku. Selanjutnya temuan dari Agustina dkk (2025 :26) menunjukkan bahwa tekanan semacam ini sering kali lebih kuat dirasakan oleh perempuan yang berasal dari keluarga dengan posisi adat yang penting, karena mereka memikul tanggung jawab sosial dan simbolik yang lebih besar dibandingkan perempuan lainnya.

Meskipun demikian, perubahan sosial yang berlangsung dalam dua dekade terakhir menunjukkan arah yang cukup menggembirakan. Akses informasi yang semakin luas, meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan, serta berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung pemerataan pendidikan telah mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap perempuan. Pendidikan tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kebutuhan laki-laki, tetapi semakin diakui sebagai hak dan modal penting bagi setiap anak, tanpa memandang gender. Temuan Naibaho dkk (2024 :320) menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga Batak di perkotaan kini memandang pendidikan anak perempuan dan laki-laki sebagai sesuatu yang sama pentingnya. Perubahan ini menunjukkan bahwa nilai budaya tidak selalu bersifat tetap; ia dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks tersebut, pendidikan mulai dilihat bukan sebagai ancaman bagi tradisi, melainkan sebagai sarana yang memungkinkan perempuan Batak mengembangkan potensi dirinya sekaligus tetap menjaga identitas budaya yang mereka warisi.

3.3. Pendidikan sebagai Katalisator Transformasi Peran Sosial Perempuan Batak

Bagi banyak perempuan Batak, pendidikan telah menjadi jalan penting untuk membuka peluang hidup yang lebih luas sekaligus memperkuat posisi mereka dalam keluarga dan masyarakat. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga

menghadirkan kepercayaan diri, kemandirian, serta kemampuan untuk berpartisipasi lebih aktif dalam berbagai keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Penelitian Setiawati dkk (2018 :330) menunjukkan bahwa perempuan Batak yang menempuh pendidikan tinggi memiliki keterlibatan yang jauh lebih besar dalam pengambilan keputusan keluarga dibandingkan mereka yang berpendidikan dasar. Mereka lebih aktif dalam menentukan arah pendidikan anak, mengelola keuangan keluarga, hingga merencanakan masa depan rumah tangga (Girsang, 2023 : 121). Temuan ini memperlihatkan bahwa pendidikan bukan sekadar sarana memperoleh pekerjaan, melainkan juga sumber daya yang memperkuat posisi tawar perempuan dalam relasi sosial sehari-hari.

Perubahan serupa juga terlihat di ruang publik. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak perempuan Batak yang tampil sebagai pemimpin, akademisi, birokrat, maupun tokoh masyarakat. Kehadiran mereka dalam berbagai bidang menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pendukung di balik layar, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi langsung dalam proses pembangunan sosial dan politik (Arabiyah dkk, 2024 :2356). Di dunia pendidikan tinggi, jumlah perempuan Batak yang melanjutkan studi ke perguruan tinggi terus meningkat. Banyak di antara mereka kemudian mengambil peran sebagai dosen, peneliti, dan pengelola lembaga pendidikan, sekaligus menjadi inspirasi bagi generasi muda yang mengikuti jejak mereka. Fenomena ini memperlihatkan bahwa akses pendidikan yang lebih luas telah membuka ruang baru bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa kehilangan keterikatannya dengan identitas budaya Batak.

Dari perspektif sosiologi, perubahan tersebut dapat dipahami melalui konsep agensi yang dikemukakan oleh Giddens (1984). Pendidikan memberi perempuan kemampuan untuk tidak hanya menerima struktur sosial yang ada, tetapi juga berinteraksi secara aktif dengannya. Dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang mereka miliki, perempuan Batak mulai menafsirkan kembali berbagai nilai budaya yang diwariskan kepada mereka. Menjadi *Boru Ni Raja* tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai menjalankan kewajiban adat, tetapi juga sebagai kemampuan untuk memberikan kontribusi yang lebih luas bagi keluarga, komunitas, dan masyarakat. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi sarana yang memungkinkan perempuan mempertahankan identitas budayanya sekaligus memperluas ruang partisipasinya di berbagai bidang kehidupan.

Transformasi tersebut tampak nyata dalam berbagai komunitas perempuan Batak yang tumbuh di daerah perantauan. Melalui organisasi dan jaringan sosial yang mereka bangun, perempuan Batak semakin aktif mendorong pentingnya pendidikan bagi generasi muda, sekaligus menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya yang mereka warisi. Pemanfaatan media digital, kegiatan literasi budaya, serta berbagai program pendampingan pendidikan menunjukkan bahwa pelestarian adat dan kemajuan pendidikan bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan. Sebaliknya, keduanya dapat berjalan beriringan dan saling memperkuat. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa identitas *Boru Ni Raja* dan identitas perempuan berpendidikan bukanlah dua hal yang harus dipilih salah satu, melainkan dua sumber kekuatan yang dapat menyatu dalam kehidupan perempuan Batak masa kini.

Meski demikian, tantangan belum sepenuhnya teratasi. Perempuan Batak yang tinggal di wilayah pedesaan masih menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan mereka yang hidup di perkotaan, baik dalam hal akses pendidikan, kondisi ekonomi, maupun dukungan

sosial. Oleh karena itu, upaya memperluas kesempatan pendidikan perlu disertai dengan pendekatan yang sensitif terhadap konteks budaya setempat. Sebagaimana dikemukakan Lubis (2020 :1235), internalisasi nilai-nilai adat Batak dalam pendidikan multikultural dapat menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Ketika pendidikan dipahami sebagai sarana untuk memperkuat dan melestarikan budaya, bukan sebagai ancaman terhadapnya, maka peluang bagi perempuan Batak untuk berkembang akan semakin terbuka. Dengan cara inilah semangat *Boru Ni Raja* dapat menemukan makna baru yang lebih relevan: bukan hanya sebagai simbol kehormatan, tetapi juga sebagai representasi perempuan yang berdaya, berpendidikan, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat tanpa kehilangan akar budayanya.

4. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa posisi perempuan Batak sebagai *Boru Ni Raja* mengandung sebuah paradoks. Di satu sisi, perempuan memperoleh penghormatan yang tinggi dalam budaya Batak sebagai penjaga kehormatan keluarga dan penghubung relasi sosial. Namun, di sisi lain, penghormatan tersebut belum selalu diikuti oleh kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan. Berbagai hambatan, seperti norma yang memprioritaskan pendidikan laki-laki, pernikahan dini, dan keterbatasan ekonomi, masih memengaruhi akses pendidikan perempuan Batak, terutama di wilayah pedesaan.

Meskipun demikian, pendidikan terbukti menjadi sarana penting bagi pemberdayaan perempuan Batak. Melalui pendidikan, perempuan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup, berpartisipasi lebih aktif dalam pengambilan keputusan keluarga, serta mengambil peran yang lebih luas di ruang publik. Pendidikan juga memungkinkan perempuan menafsirkan kembali makna *Boru Ni Raja* sebagai identitas yang tidak hanya terkait dengan peran adat, tetapi juga dengan kepemimpinan, prestasi, dan kontribusi sosial.

Karena itu, diperlukan dukungan bersama dari keluarga, komunitas adat, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi perempuan Batak. Pendidikan dan budaya tidak perlu dipertentangkan, melainkan dapat saling menguatkan. Di era modern, menjadi *Boru Ni Raja* dapat dimaknai sebagai menjadi perempuan yang berakar pada nilai budaya, sekaligus berpengetahuan, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi terwujudnya masyarakat Batak yang lebih adil dan setara.

REFERENSI

- Agustina, A., & Syarifuddin, D. (2025). Perempuan dan Dominasi Patriarki: Studi Sosiologis tentang Dominasi Simbolik dalam Rumah Tangga di Sekadau: Women and Patriarchal Power: Sociological Study of Symbolic Domination within Household in Sekadau. *Journal of Marginal Social Research*, 2(2), 26-35.
- Arabiyah, S., Hazdan, M. F., Yus, T., Pratiwilayan, P. R., & Astono, A. (2024). Progresifitas Kedudukan Boru Batak dalam Adat Batak Toba. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(3), 2354-2363.

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1-9.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. (2022). *Statistik Pendidikan Sumatera Utara 2022*. Medan: BPS Sumut.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara.(2022). *Analisis Pembangunan Manusia Berbasis Gender Provinsi Sumatera Utara 2021*. Medan: BPS Sumut.
- Butar-Butar, G. M. (2020). Eksistensi Perempuan Batak Toba Dalam Budaya Dan Agama. *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, 6(2).
- Collins, P.H. (1990). *Black Feminist Thought: Knowledge, Consciousness, and the Politics of Empowerment*. New York: Routledge.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Tradition*. London: SAGE Publications, 1998.
- Firmando, H. B. (2020). Potret pengarusutamaan gender dalam kehidupan keluarga Batak Toba di Tapanuli Utara. *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, 3(1), 47-62.
- Fredriko, A. (2024). Konstruksi Sosial Realitas Perempuan Batak Toba sebagai Parhobas pada Komunitas Adat Batak Toba di Kota Salatiga. *Jurnal Neo Societal*, 9(3), 141-152.
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Girsang, L. W. P. (2023). Ibu dan Pendidikan Anak dalam Budaya Batak Toba. *Lembaran Antropologi*.
- Heriansyah, R. (2021). Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Pernikahan Usia Dini Di Desa Bandar Tarutung Kecamatan Sangkumur Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020. *Jurnal Kesehatan Ilmiah Indonesia (Indonesian Health Scientific Journal)*, 6(2), 95-104.
- Hutahaean, A. N. P. S., & Agustina, W. (2020). Peran filosofi budaya batak toba dalam dunia pendidikan. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 9(3), 313-324.
- Irmayani, N., Sahabuddin, C., Fitrah, N., Mukharrim, M. S., & Muin, R. (2026). *Perempuan Yang Menanggung Langit*. Penerbit KBM Indonesia.
- Lubis, M. A. (2020). Revitalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Batak Toba Dalam Melindungi Eksistensi Danau Toba Di Mata Dunia (Kajian Hukum Progresif). *Jurnal Darma Agung*, 27(3), 1234-1244.
- Manurung, R., Ismail, R., Sibarani, R., & Munthe, H. M. (2026). The Existence of Batak Toba Women's Land in Patriarchal Culture, Indonesia. *Dirasat: Human & Social Sciences*, 53(1).
- Munawwarah, M., dkk. (2025). Pendidikan Untuk Perempuan: Kunci Pemberdayaan Dan Kesetaraan Gender. *Global Research and Innovation Journal*, 1(2), 278–283. Retrieved from <https://journaledutech.com/index.php/great/article/view/151>
- Naibaho, M., Manik, R., Sipahutar, A. P., Sihite, B., & Marbun, M. R. (2024). Woman Leadership in Toba Batak Society a Critical Study on Patriarchy. *Journal of Asian Orientation in Theology*, 6(2), 281–306.
- Naibaho, Y. P., Bakhtiar, Y., Dewi, S. F., & Zatalini, R. (2024). Kontribusi pendidikan terhadap peningkatan kedudukan perempuan Batak Toba pedesaan dalam keluarga dan masyarakat. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 4(2), 320-332.

- Pasaribu, L. A., Widiensyah, S., & Kuntari, S. (2026). Peran Gender dalam Budaya Patriarki pada Suku Batak Toba di Punguan Pasaribu. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 5(2), 1632-1639.
- Pardede, Martha. (2023). Transformasi Peran dan Posisi Perempuan Batak Toba dalam Karya Sastra/Martha Pardede-- Medan: USU Press.
- Setiawati, E., Malihah, E., & Komariah, S. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perempuan Berpendidikan Tinggi Berperan Sebagai Pengambil Keputusan dalam Keluarga di Kelurahan Isola. *Sosietas*, 7(1).
- Sihombing, A. A. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah Dalihan Na Tolu (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 16(2), 347-371.
- Simanjuntak, A. D. (2025). Jejak perempuan pejuang pendidikan di Sumatera utara dari masa kolonial hingga era digital. *Lanskap Sejarah Pendidikan Lokal di Indonesia*. Indonesia : Jejak Pustaka.
- Simatupang, J. B. (2021). Perempuan dalam budaya adat Batak Toba. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10288-10296.
- Sinaga, A. P. (2025). Anak Ni Raja & Boru Ni Raja: Upaya Membangun Kesenjangan Gender dalam Perspektif Budaya Batak Toba. Penerbit Adab.
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). (2021). Data Pernikahan Dini Provinsi Sumatera Utara. Jakarta: BPS.
- UNESCO. (2022). *Global Education Monitoring Report 2022 : Gender Equality in and through Education*. Paris: UNESCO Publishing.
- Weedon, C. (1997). *Feminist Practice and Poststructuralist Theory*. Oxford: Blackwell Publishing.